



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WENING UDASMORO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEMAHasiswaAN**
3. NHK : **657987**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m²/450 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , WARISAN Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 7000 m²/600 m² di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , WARISAN Rp. 2.500.000.000
5. Tanah Seluas 3000 m² di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , WARISAN Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 10.274.000.000



III. HUTANG

Rp. 406.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.868.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.